

LAPORAN NOTULA

Workshop Kepemimpinan Perempuan Kementerian Desa PDTT

Selasa, 26 Oktober 2021 – Pukul: 09.00-17.00

PENDAHULUAN

Dalam rangka mengimplementasikan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Sub Komponen 2B, diselenggarakan *workshop* kepemimpinan perempuan guna mewujudkan desa inklusif. *Workshop* ini diselenggarakan pada Selasa, 26 Oktober 2021 dengan mengundang narasumber Ibu Leny N Rosalin dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak, serta Ibu Alysa Wahid selaku Tenaga Ahli Utama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

TUJUAN

Mendorong hadirnya pemimpin perempuan yang dapat mewujudkan pembangunan Desa Inklusif maupun Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

PEMBAHASAN

Diskusi Panel “Akselerasi Pencapaian SDGs Desa Melalui Kepemimpinan Perempuan dan Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak”

1. **Ibu Leny N Rosalin**, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak menyampaikan hal seputar:
 - Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam berbagai data-data mengenai pembangunan, seperti Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, Rata-rata lama sekolah, Pengeluaran Per Kapita, hingga kesenjangan gender dalam upah.
 - Kesenjangan-kesenjangan tersebut dapat menjadi alasan bagi setiap Desa di Indonesia untuk mengembangkan Desa Inklusif atau Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
 - Dalam mengembangkan DRPPA, terdapat tujuh prinsip utama yang perlu diperhatikan desa dalam mengembangkan hal tersebut, yaitu: (1) Non-diskriminasi; (2) Demokratis; (3) Gotong-royong; (4) Tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak; (5) Penghargaan terhadap pandangan perempuan dan anak; (6) Kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak; (7) *Affirmative action*.
 - Selain itu, Desa dalam mengembangkan DRPPA juga perlu memperhatikan indikator DRPPA, yang terdiri dari: (1) Adanya pengorganisasian perempuan dan anak di desa; (2) Tersedianya data desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak; (3) Tersedianya Peraturan Desa tentang DRPPA; (4) Tersedianya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan DRPPA; (5) Persentase

keterlibatan perempuan di Pemerintahan Desa; (6) Persentase perempuan berwirausaha di desa; (7) Pengasuhan berbasis hak anak; (8) Tidak ada kekerasan anak; (9) Tidak ada pekerja anak; (10) Tidak ada perkawinan anak di bawah usia 19 tahun.

2. **Ibu Allya Wahid**, selaku Tenaga Ahli Utama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyampaikan pokok penting terkait kepemimpinan perempuan, yaitu:

- Dalam mengembangkan desa inklusif dan ramah perempuan, keterlibatan yang dibutuhkan tidak hanya terbatas pada perempuan, tetapi juga laki-laki untuk menyukseskan hal tersebut.
- Perempuan dalam kepemimpinan memiliki keunggulan-keunggulan yang berbeda dibandingkan dengan laki-laki. Keunggulan seperti lemah lembut dan juga humanis merupakan dua keunggulan yang seharusnya dapat mendorong keterlibatan perempuan dalam pemerintahan, khusus di tingkat desa.
- Dalam perannya sebagai pemimpin, perempuan perlu menyadari adanya lima tahapan kepemimpinan yang dipopulerkan oleh John C. Maxwell, yaitu: (1) *Position*: Kondisi seorang pemimpin yang hanya dituruti karena memiliki power/jabatan; (2) *Permission*: kondisi seorang pemimpin yang dituruti karena dipercaya secara pribadi; (3) *Production*: kondisi pemimpin yang dituruti karena memiliki kinerja yang baik; (4) *People Development*: kondisi pemimpin yang diikuti karena adanya keinginan untuk tumbuh bersama pemimpin tersebut; (5) *Personhood*: kondisi seorang pemimpin diikuti karena adanya karisma dan visi perjuangan yang sama.

Keynote speech

3. **Bapak Sugito S.Sos, M.H** selaku Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan menyampaikan pokok penting terkait kepemimpinan perempuan, yaitu:

- Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 tentang peningkatan kesetaraan gender, peningkatan pengetahuan dan peran partisipasi perempuan dalam pembangunan, Kemendesa PDTT bersama Kementerian Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak mendorong SDGs tujuan ke 5 terkait keterlibatan perempuan dan anak dalam pembangunan.
- Perlunya keterpaduan kolektif dari berbagai OPD untuk melibatkan perempuan dalam pembangunan dan tujuan program workshop ini adalah menyamakan persepsi tentang kepemimpinannya perempuan desa inklusif.

4. **Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati** selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan hal seputar:

- Konstitusi UUD 45 RI dengan tegas mengamanatkan pemenuhan HAM dengan prinsip kesetaraan. Negara menjamin setiap warganya memiliki akses yg sama dan mengambil peran dalam pembangunan.

- Sistem sosial masyarakat yang masih erat dengan budaya patriarkis masih menempatkan perempuan di kelompok marginal. Situasi timpang ini tercermin di IPM dan IPG (Indeks Pembangunan Gender) yang angkanya masih lebih kecil perempuan dibandingkan laki-laki. Untuk mengakhiri ketimpangan, perlu ada pembangunan yang inklusif. Kepemimpinan perempuan menjadi poin penting yang perlu didorong implementasinya.
- Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan IPG dengan meningkatkan pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Perempuan didorong untuk melakukan perubahan baik di keluarga maupun masyarakat lewat program desa ramah perempuan dan peduli anak.
- Desa ramah perempuan dan peduli anak juga penting, dimana penyusunan strategi mewujudkan desa telah diharmonisasikan penyelesaian 5 isu prioritas oleh Pak Joko Widodo. Di tahun 2021, KemenPPA sudah membuat model di 5 provinsi dan 5 kabupaten untuk menyelesaikan desa ramah perempuan dan anak.
- Pelatihan kepemimpinan bekerja sama dengan OMS namun juga melakukan pendampingan di pedesaan. Adapun harapannya, Dari 74rb lebih desa minimal 30% perempuan terlibat dalam pembangunan.

5. **Bapak Drs. Abdul Halim Iskandar** selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyampaikan hal seputar:

- Perempuan unggul dalam pendidikan menengah namun kurang kesempatan kerja. Data Angka Partisipasi Murni (APM) SMP perempuan sebanyak 78,65% dan laki-laki 97,49% dan untuk APM SMA perempuan sejumlah 58,84%, sementara laki-laki hanya 55,31%.
- Tetapi, ketika bicara pada kesempatan kerja, dari 15,74% Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) hanya 67,5% yang bekerja. Sementara, dari total 84,26% kepala rumah tangga laki-laki, yang bekerja sebanyak 94,93%.
- Dari data yg dimiliki, dibutuhkan peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan di desa

6. **Bapak Taufiq Majid** selaku Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT menyampaikan hal sebagai berikut:

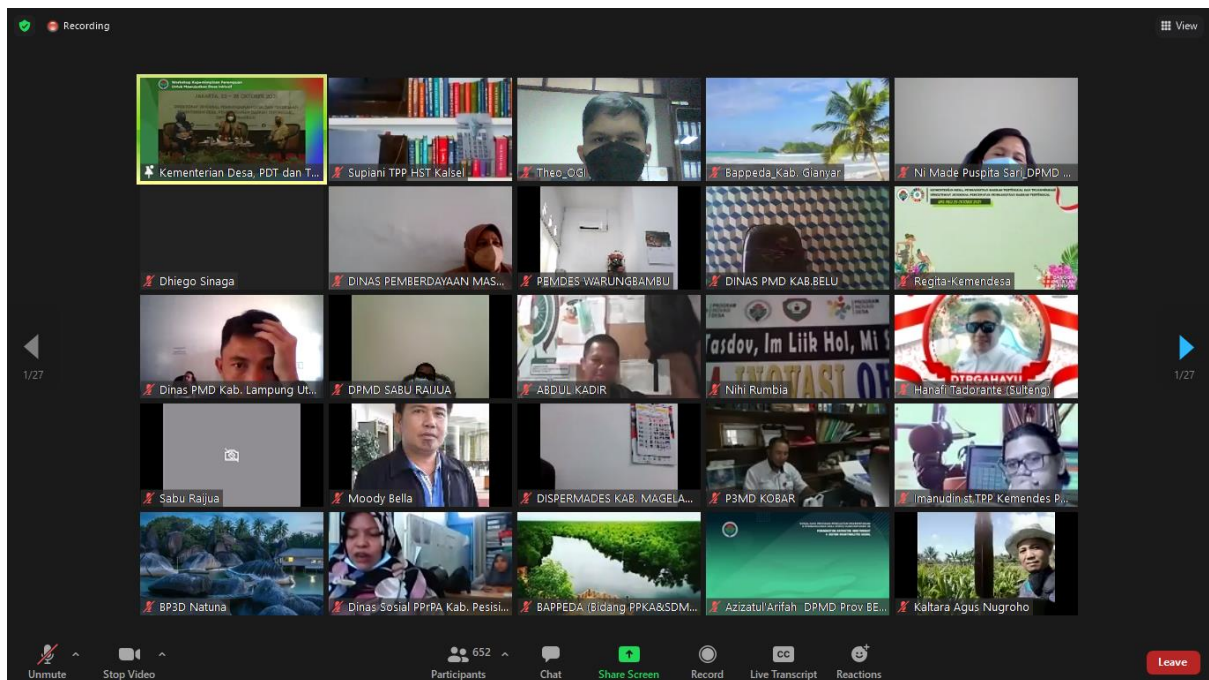
- Terkait isu perempuan, di pemerintahan sejak periode pertama hingga periode kedua Pak Jokowi, pemerintah sudah melibatkan perempuan di proses pembangunan. Pemerintah memberikan kesempatan dan peluang yang besar pada perempuan. Contoh nyatanya, dari 8 unit kerja eselon 1 di Kemendes PDTT, 50% nya perempuan. Betapa afirmasi ini sudah diberikan pada perempuan. Perempuan Indonesia perlu menjemput kesempatan.
- Kalau berbicara pada level desa terdapat empat pilar strategi percepatan pelibatan perempuan, yakni: (1) penguatan kelembagaan di desa, (2) Perlunya inovasi di desa, (3) Harus ada pendanaan, (4) Pendampingan.
- Konsep norma perlu dibuat implementatif sehingga dapat dilaksanakan di level desa.

7. **Dr. Femy Kartika Putri** selaku Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kepemimpinan Perempuan, KPPA menyampaikan hal terkait peningkatan kualitas perempuan di desa sebagai berikut:
- Mengapresiasi Kemendesa pddt dan Kemen PPA
 - Beliau ingin membangun dan meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan di desa. Gotong royong mulai dari pemimpin hingga masyarakat desa diperlukan agar SDM yang diharapkan dapat terwujud. Salah satu strateginya adalah menanamkan pentingnya pelibatan dan edukasi perempuan mulai dari 1000 hari pertama kehidupan, hingga siap menjadi pemimpin desa.
 - Jumlah kepala desa 2020 74 ribu-nya laki-laki dan 30 ribu kepala desa nya perempuan kepala desa
8. **Ibu Andi Wahyuli, S.Pd** selaku Kepala Desa Mallari, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan membagikan pengalaman beliau selama menjadi Kepala Desa, sebagai berikut:
- Cara beliau mengorganisir masyarakat itu berdasarkan data. Dimana data tadi dimanfaatkan untuk pelayanan publik. Dengan adanya pendataan bisa dilakukan perubahan dengan mengelompokkan permasalahan dan peluang untuk memberikan pelayanan.
 - Adapun strategi dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam Pembangunan desa: (1) Penguatan kapasitas, (2) Pelatihan perencanaan dan penganggaran di Desa
 - Tidak hanya itu, maraknya perkawinan anak dapat juga disiasati dengan campur tangan Kepala Desa. Beliau menjelaskan bahwa adanya perlindungan pencegahan perkawinan anak, dari sosialisasi (untuk orang tua anak) hingga efek malu kepada keluarga dengan tidak hadirnya kepala desa dan orang yang bertugas untuk memotong sapi (salah satu ritual di desa) jika perkawinan tetap dilanjutkan.

KESIMPULAN

Dalam proses Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa Inklusif dibutuhkan aksi kolektif dari semua pihak. Aksi kolektif ini tidak harus besar, namun dapat dimulai dari diri sendiri dan ditularkan kepada orang lain. SDGs harus dilokalkan ke dalam SDGs Desa, dimana diperlukan (1) Penguatan kelembagaan di desa, (2) Inovasi di desa (3) Pendanaan, dan (4) Pendampingan, untuk memastikan program Desa Ramah Perempuan Perempuan dan Peduli Anak dapat berjalan dan berkembang dengan baik.

DOKUMENTASI



You are viewing Lucky Wardani, PSBLDP's screen View Options **INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)** **BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN PROVINSI** **TAHUN 2020**

00:11:07



You are viewing Lucky Wardani, PSBLDP's screen View Options

00:07:42

Non Diskriminasi

Demokrasi

Gotong-royong

Tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak

Penghargaan terhadap pandangan perempuan dan anak

Kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak

Affirmative Action

PRINSIP DRPPA

Unmute Start Video Participants 797 Chat Share Screen Record Live Transcript Reactions Leave

Talking: Kementerian Desa, PDT...